

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan proses dari tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dari pendapatan perkapita yang terus menerus cenderung mengalami peningkatan. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi yaitu penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan (Muhammad et al., 2023). Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, yang cenderung mengalami peningkatan dalam beberapa periode tertentu dan peningkatan pendapatan perkapita. Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat. Peningkatan pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menggambarkan terciptanya suatu proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi output, peningkatan jumlah konsumsi, dan peningkatan pendapatan (Sukirno, 2010:10).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tren pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup positif, terutama didorong oleh sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan ketimpangan ekonomi. Meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT meningkat dari tahun ke tahun,

tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di provinsi ini masih tergolong tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di NTT pada tahun 2023 masih berada di atas 20%, sementara indeks ketimpangan yang diukur dengan Gini Ratio menunjukkan fluktuasi dan tidak menunjukkan perbaikan yang konsisten seiring pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks pembangunan di mana pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak secara otomatis menurunkan ketimpangan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di NTT cenderung tidak inklusif atau hanya dinikmati oleh kelompok tertentu di masyarakat. Selain itu, ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di NTT juga cukup tajam, di mana daerah perkotaan seperti Kota Kupang cenderung lebih maju dibandingkan daerah-daerah terpencil seperti Alor, Lembata, atau Sabu Raijua. Namun demikian, studi yang secara khusus mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di tingkat daerah di NTT masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya bersifat makro dan dilakukan pada tingkat nasional atau antarprovinsi, sehingga belum memberikan gambaran yang mendalam terkait dinamika ketimpangan ekonomi di level kabupaten/kota di NTT.

Selain itu, penelitian sebelumnya juga jarang memasukkan variabel-variabel antara seperti kualitas pendidikan, infrastruktur, atau akses terhadap layanan dasar yang berpotensi memediasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan. Dari sisi metodologi, sebagian besar studi terdahulu

menggunakan pendekatan statistik deskriptif atau regresi sederhana, padahal fenomena ketimpangan bersifat kompleks dan multidimensional, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif seperti analisis data panel atau regresi spasial. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian (research gap) yang ada dengan cara menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara lebih mendalam, baik secara temporal (antarwaktu) maupun spasial (antarwilayah).

Dalam penelitian ini, digunakan tiga variabel utama untuk memperkuat analisis, yaitu kemiskinan, Indeks Williamson, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga variabel ini dipilih karena masing-masing memiliki keterkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan dan distribusi hasil pembangunan. Kemiskinan merepresentasikan dimensi kesejahteraan ekonomi masyarakat secara langsung. Dalam konteks ketimpangan, tingginya angka kemiskinan dapat menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum merata dan tidak inklusif. Ketika pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan penurunan kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat bawah belum menikmati hasil pembangunan secara proporsional.

Indeks Williamson digunakan sebagai alat ukur ketimpangan antarwilayah di dalam suatu provinsi. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin besar ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota, yang berarti hasil pertumbuhan ekonomi lebih terkonsentrasi di wilayah tertentu saja. Dengan

demikian, pertumbuhan ekonomi yang tidak tersebar secara merata secara geografis dapat memperkuat ketimpangan spasial di NTT.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan dari sisi kualitas hidup manusia, meliputi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. IPM memiliki hubungan dua arah dengan pertumbuhan dan ketimpangan: di satu sisi, IPM yang tinggi mencerminkan pembangunan manusia yang baik, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; di sisi lain, ketimpangan dalam IPM antarwilayah atau antarpenduduk menunjukkan ketidakmerataan akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, dengan menggunakan ketiga variabel ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi memengaruhi ketimpangan ekonomi di NTT, serta faktor-faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan selama tahun 2020-2024. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -0,83% akibat covid-19 namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,51% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,05% dan tahun 2023 sebesar 3,52%. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,73% Namun pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan diikuti dengan tidak meratanya pendapatan perkapita antar kabupaten, sehingga Provinsi NTT mengalami Ketimpangan Pendapatan antar kabupaten.

Tabel 1.1
PDRB Perkapita berdasarkan harga konstan menurut kabupaten/kota
Provinsi NTT tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Sumba Barat	9.971	9.865	10.008	10.199	10.404
Sumba Timur	16.227	16.185	16.357	16.617	16.981
Kupang	13.036	13.224	13.458	13.814	14.155
TTS	10.479	10.596	10.767	10.953	11.163
Timor Tengah Utara	11.120	11.211	11.349	11.512	11.709
Belu	13.665	13.628	13.770	13.997	14.262
Alor	9.445	9.535	9.662	9.900	10.159
Lembata	8.584	8.580	8.678	8.778	8.948
Flores Timur	12.687	12.581	12.612	12.824	12.979
Sikka	10.284	10.370	10.560	10.797	11.060
Ende	15.067	15.251	15.562	16.001	16.458
Ngada	14.029	13.983	14.215	14.509	14.839
Manggarai	9.576	9.655	9.755	9.946	10.161
Rote Ndao	13.495	13.559	13.806	13.963	14.182
Manggarai Barat	8.877	8.821	9.003	9.249	9.516
Sumba Tengah	8.920	8.831	8.868	8.943	9.090
Sumba Barat Daya	7.609	7.627	7.754	7.826	7.969
Nagekeo	8.670	8.712	8.854	9.003	9.157
Manggarai Timur	7.417	7.456	7.587	7.706	7.863
Sabu Raijua	8.698	8.693	8.815	8.905	9.100
Malaka	10.246	10.299	10.543	10.797	10.987
Kota Kupang	37.179	36.846	37.407	38.225	39.380
NTT	265.281	265.508	269.390	274.464	280.522

Sumber: data dioah, 2025

Tabel 1.1 menunjukkan PDRB perkapita kabupaten/kota Provinsi NTT yang belum merata. Daerah dengan tingkat PDRB perkapita tertinggi terdapat di Kota Kupang sebesar 39,80% persen pada tahun 2024. Daerah dengan tingkat pendapatan perkapita yang rendah terdapat di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 7,863% persen pada tahun 2024.

Ketimpangan ekonomi mengukur seberapa meratanya pendapatan ekonomi tersebut telah didistribusikan. Ketimpangan ekonomi dapat diukur menggunakan Indeks Wiliamson. Berdasarkan tabel 1.2 tingkat ketimpangan

pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan pada beberapa daerah dan mengalami peningkatan pada daerah lainnya.

Tabel 1.2
Indeks Wiliamson di Provinsi NTT menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Sumba Barat	0.020	0.020	0.021	0.021	0.021
Sumba Timur	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043
Kupang	0.006	0.011	0.017	0.012	0.020
Timor Tengah Selatan	0.069	0.068	0.066	0.064	0.061
Timor Tengah Utara	0.027	0.027	0.026	0.026	0.025
Belu	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008
Alor	0.051	0.050	0.049	0.049	0.047
Lembata	0.056	0.057	0.058	0.059	0.060
Flores Timur	0.013	0.013	0.012	0.012	0.013
Sikka	0.054	0.053	0.051	0.049	0.047
Ende	0.030	0.032	0.034	0.036	0.038
Ngada	0.017	0.018	0.017	0.017	0.017
Manggarai	0.076	0.076	0.076	0.077	0.077
Rote Ndao	0.008	0.012	0.016	0.020	0.023
Manggarai Barat	0.076	0.078	0.080	0.081	0.082
Sumba Tengah	0.022	0.022	0.023	0.023	0.023
Sumba Barat Daya	0,081	0,082	0,083	0,083	0,084
Nagekeo	0.044	0.044	0.044	0.044	0.045
Manggarai Timur	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
Sabu Raijua	0.042	0.044	0.046	0.048	0.050
Malaka	0.045	0.045	0.046	0.046	0.047
Kota Kupang	0,379	0,382	0,385	0,389	0,390
Nusa Tenggara Timur	0,53	0,54	0,54	0,54	0,55

Sumber: data diolah, 2025

Perbedaan tingkat ketimpangan pendapatan perkapita antar kabupaten di Provinsi NTT dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Berdasarkan tabel 1.3 jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat di Kabupaten TTS sebesar 117,41 jiwa pada tahun 2024, dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

sebanyak 115,51 jiwa tahun 2023. Jumlah penduduk miskin terendah terdapat di Kabupaten Ngada sebesar 20,48 jiwa pada tahun 2024.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota, di NTT Tahun 2020-2024

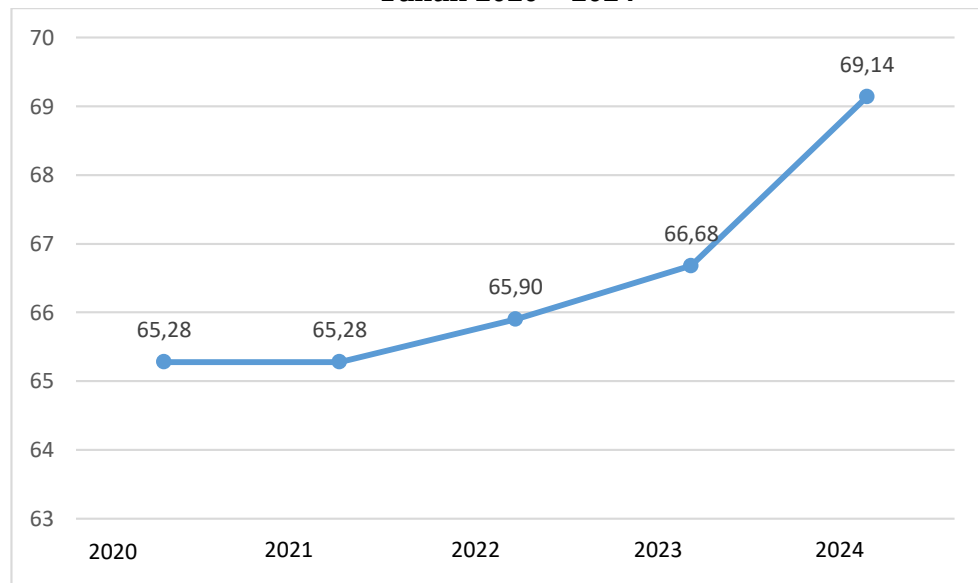
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Sumba Barat	36,95	37,78	37,06	37,15	36,72
Sumba Timur	77,3	78,33	75,28	75,66	73,58
Kupang	94,94	91,25	88,02	90,23	90,34
Timor Tengah Selatan	128,98	125,68	120,45	119,51	117,41
Timor Tengah Utara	56,98	58,33	55,88	57,19	55,03
Belu	34,18	35,41	33,98	33,19	32,57
Alor	43,55	43,83	42,3	41,91	41,89
Lembata	37,92	38,75	37,88	37,94	37,72
Flores Timur	27,89	28,9	28,08	30,93	29,74
Sikka	42,18	43,09	40,87	40,81	38,73
Ende	65,22	66,38	63,4	63,1	62,37
Ngada	20,62	20,98	20,14	20,57	20,48
Manggarai	69,52	71,03	69,68	70	68,39
Rote Ndao	48,77	51,71	52,43	53,55	52,89
Manggarai Barat	49,4	51,15	49,95	49,95	50,68
Sumba Tengah	25,37	25,48	24,49	24,24	23,81
Sumba Barat Daya	97,81	100,42	98,5	101,4	102,05
Nagekeo	18,51	19,11	18,01	18,57	18,68
Manggarai Timur	76,69	77,17	74,55	74,4	74,59
Sabu Raijua	30,14	30,6	30	30,43	30,98
Malaka	31,12	32,17	30,48	29,19	28,54
Kota Kupang	39,72	41,77	40,2	41,2	40,38
Nusa Tenggara Timur	1.153,76	1.169,31	1.131,62	1.141,11	1.127,57

Sumber: BPS NTT 2020

Kapasitas manusia yang inovatif, kualifikasi, dan tenaga kerja yang terdidik dengan baik diharapkan dalam peningkatan sektor perekonomian (Palinescu, 2015). Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu menggunakan dan menciptakan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas. Kondisi sumber daya manusia suatu wilayah dapat menentukan peningkatan pemerataan pada wilayah yang ditentukan oleh kualitas sumber

daya manusia, sehingga indeks pembangunan manusia dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan dalam suatu daerah.

Gambar 1.1
Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT
Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS NTT 2024

Secara umum, indeks pembangunan manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengalami kemajuan selama tahun 2020-2024, IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 hingga 2024 IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan kemajuan dengan mengalami peningkatan 2,46%, sehingga status pembangunan manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan.

Berdasarkan penelitian dari (Septian, 2018) di Sumatera Utara terjadinya konvergensi ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Adapun variabel-variabel yang berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan perkapita dalam rangka mendorong konvergensi ekonomi adalah belanja modal, indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Hal ini menunjukkan

bahwa IPM memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi yang akan mengurangi ketimpangan. Menurut Muzani dan Benardin faktor yang diperkirakan berperan dalam menentukan tingkat konvergensi yang berkaitan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan diantaranya ialah pendapatan tahun sebelumnya atau PDRB perkapita tahun sebelumnya, IPM, penanaman modal, dan inflasi. (Latuconsina, 2017)

Adapun Badan Pusat Statistik mengartikan IPM sebagai sebuah metode pengukuran yang menggambarkan kualitas hidup manusia. IPM dibentuk dari tiga dimensi yaitu, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. (Muhammad et al., 2023) menyatakan bahwa ketika kualitas sumber daya manusia ditingkatkan maka secara berangsur-angsur produktifitas naik serta kualitas dari produknya juga akan naik. Sehingga naiknya produktifitas ini akan berdampak positif pada kinerja ekonomi regional. Begitu juga ketika PDRB di suatu daerah naik maka pendapatan yang diperoleh dari hal ini bisa dialokasikan ke sektor yang bisa menunjang peningkatan kualitas modal manusia seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain sehingga kualitas modal manusia akan cenderung positif. Belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan akan menunjang meningkatnya IPM.

Konvergensi merupakan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah melalui proses peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal untuk mengejar ketinggalannya dari daerah maju. Daerah yang tertinggal kemudian akan terus melakukan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya

yang lebih maju dan tidak terjadi ketimpangan pendapatan antarwilayah (Faqieh, 2016).

Terjadinya konvergensi sangat diharapkan oleh masyarakat di Provinsi NTT agar dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: Apakah ada kecenderungan terjadi konvergensi di NTT periode tahun 2020–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk melihat adanya konvergensi ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Untuk mengetahui apakah terjadi konvergensi pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana masukan bagi pihak pemerintah dalam pembuatan kebijakan mengenai rencana pembangunan, khususnya para perencana pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya, serta untuk peneliti dapat mengetahui kenyataan yang terdapat dilapangan dan membandingkannya dengan teori dan juga dapat menambah wawasan.